BAB III
DINAMIKA KRISIS PANGAN DI SUDAN SELATAN

Pangan menjadi salah satu instrumen paling rentan di dunia internasional saat ini. Setiap harinya diseluruh negara di dunia, pangan muncul sebagai masalah yang lebih beraneka ragam. Masalah-masalah tersebut muncul saat suatu negara atau rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai contoh, Sudan Selatan muncul sebagai negara termuda di dunia dan negara yang memiliki masalah pangan terburuk di dunia. PBB telah mengumumkan bahwa akan terjadi suatu gejolak yang sangat besar di wilayah ini. Kelaparan muncul sebagai masalah pangan yang membuat negara ini terus mengalami kondisi gizi buruk dan menelan banyak korban jiwa. Sampai saat ini, dukungan terus muncul dengan diberikannya bantuan dari dunia internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.

A. Sejarah Sudan Selatan

Gambar 3.1

Peta Sudan Selatan

Sumber: *South Sudan*. Pada Website *Worldatlas*. (2017)

Sudan Selatan adalah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur-Tengah, yang memiliki perbatasan 6,018.00 km dengan Republik Afrika Tengah (1.055 km), Republik Demokratik Kongo (714 km), Ethiopia (1.299 km), Kenya (317 km), Sudan (2.158 km) dan Uganda (475 km). Ibukota dari Sudan Selatan adalah Juba. Kota Juba merupakan ibukota sementara Sudan Selatan yang ditetapkan sejak tahun 2005, sebelum Sudan Selatan meraih kemerdekaannya pada 2011. Pada akhirnya saat Sudan Selatan meraih kemerdekaannya tahun 2011 kota Juba secara resmi menjadi ibukota dari Sudan Selatan. Populasi Juba diperkirakan sekitar 492.970 pada tahun 2014, menjadikan Juba sebagai kota terpadat di Sudan Selatan. (Graphicmaps, 2018) Total populasi Sudan Selatan adalah sebanyak 12,9 juta jiwa. Diantaranya sekitar separuh dari populasinya yaitu 6,1 juta jiwa sedang mengalami kerawanan pangan yang cukup tinggi dan 1,7 juta jiwa telah mengungsi ke daerah yang lebih aman. (World Food Programme, 2018)

Kemerdekaan Sudan Selatan telah menjadi suatu sejarah yang sebenarnya sudah ada sejak zama kolonial. Pada abad ke 9-10, daerah Sudan mengalami masa kolonial oleh bangsa Mesir dan membuat pada saat itu agama islam berkembang pesat di Sudan. Kemudian. muncul Inggris yang melakukan kolonial di daerah Sudan yang membuat agama Kristen mulai menyebar di Sudan. Terlepas dari kenyataan bahwa utara dan selatan Sudan dikelola secara terpisah di bawah pemerintahan kolonial, dengan munculnya dekolonisasi, Inggris berencana memberikan kemerdekaan kepada Sudan. Hal tersebut secara tidak langsung membagi wilayah Sudan pada saat itu menjadi dua paradigma budaya dan memastikan bahwa kedua daerah ini memiliki interaksi satu sama lain. (Varma, 2011, pp. 2-3)

Pada tahun 1955, setahun sebelum diproklamasikan kemerdekaannya, Sudan mengalami perang saudara yang berlanjut hingga 1972 dan mengakibatkan hampir 500.000 orang kehilangan nyawa. Kedua belah pihak yang bertikai adalah orang Sudan utara, yang telah diberikan kekuasaan yang lebih besar dan Sudan selatan, yang merasa diabaikan.

Sebagaimana Francis M. Deng menjelaskan bahwa pada saat kemerdekaan, pemerintahan dualistik dibalik menjadi sistem kesatuan di mana Sudan Utara mendominasi dan mulai menerapkan kebijakan Arabisasi dan Islamisasi di Selatan. Pada saat itu, Selatan telah mengkonsolidasikan tidak hanya warisan perlawanan terhadap perbudakan, Arabisasi dan Islamisasi, tetapi juga untuk kebijakan kolonial separatis. Dan juga pengaruh agama Kristen dan unsur-unsur budaya Barat telah memperkuat identitas Selatan yang berbeda. (Varma, 2011, p. 3) Hal tersebutlah yang membuat keretakan antara Sudan Utara dan Selatan yang memicu terbentuknya Sudan Selatan.

Telah terjadi beberapa kudeta terhadap Presiden Sudan pada saat itu. Pada saat terjadi kudeta tahun 1969 dimana Jenderal Jaafar Nimeiri melancarkan kudetanya dan membuatnya menjadi Presiden hingga tahun 1985. Saat kepemimpinan Presiden Nimeiri, dia memberlakukan sistem pemerintahan menurut Hukum Islam pada seluruh wilayah Sudan. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya pemberontakan, karena wilayah Sudan Selatan adalah wilayah yang mayoritas menganut agama non-Islam. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh partai *Sudan People Liberation Movement/Army* (SPLM/A) yang dipimpin oleh John Garang de Mabior. (Embassy Of The Republic Of Indonesia, 2015) Dalam partai SPLM/A, terdapat visi yaitu tentang keadilan dan kesetaraan untuk semua orang Sudan. Selatan pada saat itu harus memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari Sudan yang bersatu. Dibawah kendali SPLM/A inilah terbentuknya *New Sudan* atau Sudan Selatan. (Johnson, 2016, p. 5)

Setelah terjadi rangkian panjang pemberontakan, tahun 2005 terjadi kesepakatan damai antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A. Kesepakatan tersebut disebut dengan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA). (Embassy Of The Republic Of Indonesia, 2015) CPA ini sendiri merupakan awal mula terjadinya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan Utara. Dalam CPA terdapat enam protokol yaitu

Protokol Machakos, Protokol pengaturan keamanan, Protokol tentang pembagian kekayaan, Protokol tentang Pembagian-Daya, Protokol tentang resolusi konflik di Pegunungan Kordofan / Nuba selatan dan Negara Bagian Blue Nile dan Protokol tentang resolusi konflik di Abyie. (United Nations Mission In Sudan, 2018) Dan akhirnya pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan berhasil mencapai kemerdekaannya dengan memisahkan diri dari Sudan melalui Referendum. Dapat dilihat pada gambar hasil referendum dibawah sebanyak 98.83% rakyat Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan (Southern Sudan Referendum Commission (SSRC), 2011).

Gambar 3.2

Hasil Referendum Sudan Selatan

Referendum Results: Overview

Regions	Valid Votes	Unity	Unity Votes %	Secession	Secession Votes %
South	3,713,596	16,129	0.43%	3,697,467	99.57%
Other Locations	123,810	28,759	23.23%	95,051	76.77%
Grand Total	**3,837,406**	**44,888**	**1.17%**	**3,792,518**	**98.83%**

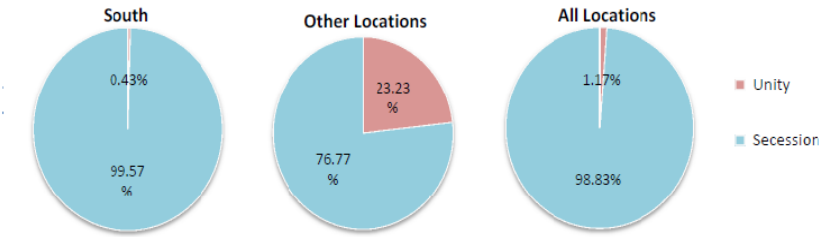

Sumber: *Results for the Referendum of Southern Sudan*. Pada Document from Website *Southern Sudan Referendum Commission (SSRC).* (2011)

B. Sistem Politik Sudan Selatan

Ketika John Garang bergabung dengan pemberontakan tentara yang telah ia hancurkan pada tahun 1983 dan wafat dalam kecelakaan pada 30 Juli 2005. Salva Kiir Mayardit bergabung dengannya untuk menemukan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), dan bangkit untuk memimpin sayap militernya, SPLA. Salva Kiir Mayardit yang lahir pada 1951 adalah presiden saat ini dari pemerintah otonom Sudan Selatan dan penerus jabatan wakil presiden Sudan. Kiir dipilih oleh kepemimpinan SPLA untuk melanjutkan proses perdamaian yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara Sudan Kedua pada Januari 2005. Kiir berasal dari sebuah desa dekat perbatasan utara-selatan Sudan di Negara Warrap, salah satu daerah yang paling terbelakang di selatan yang dilanda perang. Dan berasal dari suku Dinka terbesar di selatan, yang menurut para pengritik mendominasi politik selatan dan tentara. (Aljazeera, 2010)

Sebagai Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit adalah kepala Pemerintah Sudan Selatan dan Panglima Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA). Kiir mewakili kehendak rakyat dan menjalankan kekuasaan yang diinvestasikan di kantor Presiden Pemerintah Sudan Selatan oleh Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA), Konstitusi Sementara Sudan Selatan dan Konstitusi Nasional Sementara. (Stanford University Libraries, 2009)

Struktur pemerintahan Sudan Selatan terdiri sebagai berikut; (Gurtong, 2018)

1. Konstitusi
   Pemerintah Sudan Selatan didasarkan pada Konstitusi Sementara Sudan Selatan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian Komprehensif. Rincian struktur Pemerintah Sudan Selatan dan tanggung jawabnya ditentukan oleh konstitusi sementara.

2. Eksekutif
   Cabang eksekutif Pemerintah Sudan Selatan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Menteri. Pertama, Presidennya adalah H.E Letnan Jenderal Salva Kiir Mayardit. Presiden Pemerintah Sudan Selatan adalah kepala Pemerintah Sudan Selatan dan Panglima Tentara Pembebasan Rakyat Sudan. Presiden GOSS juga menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Republik Sudan. Kedua, Wakil Presidennya adalah H. Letnan Jenderal Dr. Riek Machar Teny-Dourghon. Wakil Presiden (V-P) dari Pemerintah Sudan Selatan berfungsi sebagai asisten bagi presiden GoSS dan ditunjuk oleh Presiden Pemerintah Sudan Selatan. V-P saat ini juga merupakan Mediator Utama dalam Pemerintah Uganda / LRA Peace Talks. Ketiga, Dewan Menteri Sudan Selatan yang juga terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah Sudan Selatan.
3. Legislatif
   Majelis Legislatif Sudan Selatan Transisi dibentuk untuk mengadopsi Konstitusi Sementara Sudan Selatan. Setelah pemilihan umum pada 2008, telah disusun kembali menjadi Majelis Legislatif Sudan Selatan. Majelis Legislatif Sudan Selatan Transisi terdiri atas 170 anggota yang ditunjuk oleh Presiden GOSS; 70% mewakili Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA); 15% mewakili Partai Kongres Nasional (NCP); dan 15% mewakili kekuatan politik Sudan Selatan lainnya. Majelis Legislatif Sudan Selatan harus membuat undang-undang berdasarkan hal-hal berikut:
   (a) Konstitusi Nasional Sementara;
   (b) Konstitusi Sementara Sudan Selatan;
   (c) Adat istiadat dan tradisi masyarakat Sudan Selatan;
   (d) Konsensus rakyat Sudan Selatan; dan
   (e) Sumber apa pun yang ditentukan.
4. Komisi & Lembaga Independen Sudan Selatan

Menurut konstitusi, GOSS memiliki mandat untuk membentuk lembaga dan komisi independen sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA), Konstitusi Sementara Sudan Selatan dan Konstitusi Nasional Sementara. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi ini menjalankan fungsi dan tugas mereka secara netral dan tanpa campur tangan dari orang atau badan apa pun. GOSS juga memiliki mandat untuk membentuk lembaga dan komisi lain yang sesuai dengan kewenangannya, karena dianggap perlu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintahan yang baik dan keadilan.

C. Pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaan

Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pangan:

> *"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."*

Pangan merupakan hal yang penting bagi suatu negara, dimana dengan pangan rakyat maupun negara dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat bertahan hidup. Kondisi pangan pada setiap negara jelas berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada tersedianya sumber daya alam atau sumber daya manusia, tingkat produksi dan konsumsi suatu negara.

1. Kondisi pangan Sudan Selatan sebelum munculnya *World Food Programme* (WFP)

Jauh sebelum Sudan Selatan merdeka, kondisi pangan negara ini tidaklah baik karena situasi politik dan konflik yang terus terjadi yang membuat berjalannya pertumbuhan ekonomi menjadi buruk. Hingga pada tahun 2011, ketika Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan kondisi pangan semakin memburuk. Banyak rakyat Sudan Selatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga memicu terjadinya kelaparan yang sangat buruk. Hal tersebut semakin hari semakin memburuk dan pada akhirnya memicu terjadinya krisis pangan keseluruh wilayah Sudan Selatan.

Gambar 3.3

Krisis Sudan Selatan

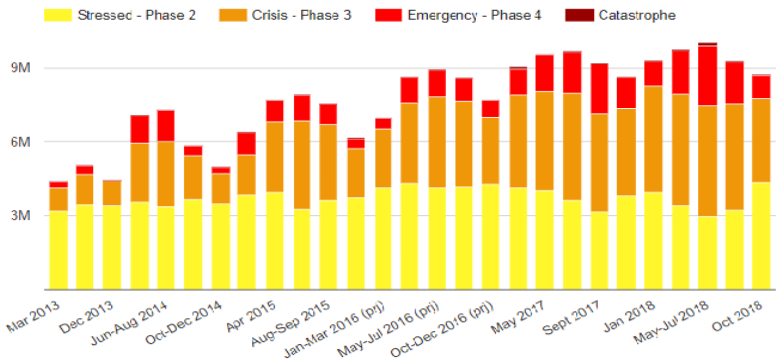

Sumber: *Crisis in South Sudan.* Pada Website *Food and Agriculture Organization of The United Nations*. (2018)

Gambar diatas memperlihatkan tentang populasi Sudan Selatan berdasarkan perhitungan oleh IPC dalam beberapa fase yaitu fase *stressed* (ditandai dengan warna kuning), fase *crisis* (ditandai dengan warna orange), fase *emergency* (ditandai dengan warna merah) dan *catastrophe* (ditandai dengan warna cokelat). Bila kita lihat, terjadi ketidakstabilan populasi yang

membawa angka populasi Sudan Selatan di berbagai wilayah cenderung turun maupun naik dari tahun ke tahun berdasarkan fase *stressed, crisis, emergency* dan c*atastrophe*. Populasi ini jelas dipengaruhi oleh kondisi dari pangan yang ada di Sudan Selatan

Berdasarkan empat dimensi yang didalamnya terdiri dari beberapa indikator ketahanan pangan yang dijelaskan oleh FAO yaitu *Availability*, *Access*, *Utilization* dan *Stability*, secara tidak langsung dapat digambarkan bagaimana kondisi pangan Sudan Selatan pasca kemerdekannya. Pertama, *Availability* atau ketersediaan fisik makanan dan *Access* atau akses ekonomi dan fisik makanan, dimana produksi pertanian Sudan Selatan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan Mata pencaharian dan ketahanan pangan hingga 90% rakyat Sudan Selatan hidup bergantung pada pertanian, perikanan atau pemeliharaan ternak. Sektor pertanian merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan perdamaian Sudan Selatan, namun saat ini Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami kondisi pangan paling buruk di dunia. Pada Februari 2017, PBB mengumumkan bahwa telah terjadi bencana kelaparan yang besar di Sudan Selatan. Lebih dari separuh rakyat Sudan Selatan tidak aman pangan menurut *Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), yang memperkirakan 6,1 juta orang mengalami krisis atau tingkat ketidakamanan pangan yang lebih buruk pada Agustus-September 2018. Pemindahan populasi massal, perlambatan ekonomi dan kondisi iklim yang buruk seperti kekeringan dan banjir hanya akan lebih memperburuk situasi Sudan Selatan. (United States Agency for International Development , 2018)

Kedua, *Utilization* atau pemanfaatan pangan, dimana masyarakat Sudan Selatan mengalami masalah gizi buruk yang tinggi karena tidak adanya pemanfaatan makanan yang bernutrisi sehingga tidak menunjang tercukupinya asupan makanan yang bergizi bagi masyarakat Sudan Selatan. Sebanyak 30% rakyat Sudan Selatan kekurangan gizi akut (Suastha, 2017).

Dan ketiga, *Stability* atau stabilitas, dimana terkait dengan kondisi politik, kondisi cuaca, dan masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran dan meningkatnya harga pangan. Pada wilayah Sudan Selatan sendiri sangat jelas telah terjadi ketidakstabilan politik yang merupakan penyebab paling utama memburuknya kondisi pangan. Konflik terus terjadi antara para pemimpin Sudan Selatan yang membawa kondisi dalam negara terus memburuk. Sejak Desember 2013, panen petani terpaksa tidak berjalan lagi karena konflik yang terjadi. Hal tersebut kemudian terus memburuk dengan terjadinya inflasi yang mencapai 800% dan menyebabkan meningkatnya harga impor pangan (Suastha, 2017). Konflik dan harga minyak internasional yang lebih rendah mendorong kondisi makroekonomi yang sangat buruk di Sudan Selatan. Sebelum terjadi konflik pada tahun 2013, Produksi minyak, ekspor utama Sudan Selatan, diperkirakan mencapai 130.000 barel/ hari, turun dari 160.000 barel/hari pada awal 2017 dan 350.000 barel/hari. Dengan sumber pendapatan alternatif yang terbatas, pendapatan mata uang asing telah berkurang lebih jauh dari pra-Juli Level 2016. Akibatnya, South Sudanese Pound (SSP) semakin menurun terhadap Dolar Amerika Serikat di pasar paralel, dari 76 SSP/USD pada Oktober 2016 menjadi 182 SSP/USD pada Oktober 2017. (Famine Early Warning Systems Network, 2017)

2. Kondisi pangan Sudan Selatan pasca masuknya bantuan (*World Food Programme)* WFP

Saat terjadi konflik pada Desember 2013 menyebabkan kerusakan, kematian, dan perpindahan penduduk yang besar. Sekitar 1,7 juta jiwa mengungsi ke daerah yang aman dan 2,5 juta jiwa mengungsi di negara-negara tetangga. Terjadi ketidakstabilan ekonomi dan produksi tanaman menjadi turun dan ketergantungan pada impor meningkat dan membuat rakyat Sudan Selatan sulit untuk mendapatkan makanan bergizi di sepanjang tahun, yang membuat banyak rakyat mengalami kondisi yang bahaya terhadap pangan. (World Food Programme, 2018)

Dimulai pada tahun 2013, PBB telah memberi peringatan bahwa akan terjadi krisis yang sangat besar di Sudan Selatan akibat dari konflik yang terjadi setelah negara ini merdeka. Pada tahun tersebut atas perintah PBB melalui program pangan yaitu WFP telah merencanakan bantuan yang akan diberikan pada rakyat yang terkena konfik perang. Tahun 2014 merupakan puncak pemberian bantuan oleh WFP di daerah Sudan Selatan yang terkena konflik. Bantuan tersebut diberikan melalui udara dengan pesawat, sungai dengan kapal atau perahu dan darat dengan mobil atau truk ketika situasi dirasa cukup baik. (World Food Programme, 2018)

Memasuki tahun 2017, PBB mengumukan telah terjadi bencana kelaparan yang tinggi pada berbagai wilayah di Sudan Selatan. Kondisi yang buruk ini membuat banyak bantuan internasional mulai masuk dengan cepat di Sudan Selatan. Namun, tingkat kelaparan yang cukup tinggi membuat bantuan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan kondisi ini pada tahun itu juga. Bantuan makanan merupakan pondasi yang penting untuk menyelesaikan masalah di negara ini. *World Food Programme* (WFP), telah memberikan dukungan penyelamatan hidup bagi jutaan orang di semua daerah konflik dan di hampir semua wilayah Sudan Selatan yang dapat diakses sejak kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011. (World Food Programme, 2018)

Untuk melihat situasi atau kondisi permasalahan pangan Sudan Selatan pasca munculnya *Word Food Programme* (WFP), dapat dijelaskan berdasarkan data/dokumen yang dirilis oleh WFP dalam websitenya tentang laporan situasi Sudan Selatan. Data ini diambil pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Dimana, pada tahun 2017 bencana kelaparan diumumkan PBB dan bantuan dari WFP mulai terus masuk di Sudan Selatan sampai tahun 2018.

Pada tahun 2017, tepatnya Januari-April 2017 jumlah rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan makanan sekitar 4,6 juta jiwa. WFP memberikan bantuan transfer uang tunai dan

pelatihan keterampilan dengan kelompok yang pertama sebanyak 1.700 orang. WFP juga menyediakan bantuan makanan dan nutrisi untuk 273.000 orang di 11 wilayah yang terkena dampak paling buruk dari masalah pangan. (World Food Programme, 2017) Pada Mei-July 2017 jumlah rakyat Sudan Selatan yang membutuhkan makanan atau mengahadapi krisis pangan terus bertambah sebanyak 5.5 juta jiwa. Hingga akhir April, WFP membantu 1,8 juta jiwa dengan mendistribusikan makanan, selimut atau pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil atau menyusui serta makanan untuk program pendidikan. 7 mekanisme *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) yang dijalankan di negara-negara bagian Upper Nile, Unity dan Jonglei, telah menyediakan 2.100 mt bantuan makanan yang dapat menyelamatkan 112.600 jiwa yang didalamnya terdiri atas 23.400 anak-anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2017) Menariknya, data/dokumen pada Agustus 2017 menjelaskan sekitar 6 juta jiwa rakyat Sudan Selatan mengalami krisis pangan dari Juni-Juli 2017. (World Food Programme, 2017) Angka ini ternyata terus bertambah dengan terus diikuti dengan pengiriman bantuan. Dan pada akhir 2017, Oktober-Desember ternyata angka krisis pangan ini mulai menurun sekitar 4.8 juta jiwa. Untuk rentan waktu setahun pada 2017 secara keseluruhan sudah 4.8 juta jiwa dibantu oleh WFP, walaupun jumlah rakyat yang mengalami krisis tidak stabil dari rentan beberapa bulan. (World Food Programme, 2017)

Pada tahun 2018, Januari-Maret jumlah rakyat Sudan Selatan yang mengalami kondisi pangan buruk atau krisis pangan bertambah cukup banyak dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.1 juta jiwa. Dengan melakuan 13 misi dan 15 misi berkelanjutan tim *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) menyediakan bantuan makanan dan gizi untuk membantu 200.162 jiwa, termasuk 38.362 anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2018) Pada data yang dikeluarkan WFP maret 2018, ternyata February-April 2018 jumlah krisis pangan bertambah menjadi 6.3 juta jiwa. (World Food Programme, 2018) Dan hingga Mei-Juli 2018 jumlah

rakyat yang mengalami krisi pangan bertambah besar menjadi 7.1 juta jiwa. (World Food Programme, 2018)

Pada akhirnya, bila dilihat dari situasi terkini Sudan Selatan yang dilaporkan *World Food Programme* (WFP), kondisi pangan Sudan Selatan hingga tahun 2018 masih mengalami krisis pangan atau ketidakamanan pangan yang cukup tinggi. Meskipun bantuan-bantuan WFP terus dilancarkan, hal tersebut tidak mampu memulihkan kondisi pangan yang terjadi di Sudan Selatan.

Untuk melihat dengan mudah bagaimana kondisi pangan Sudan Selatan berdasarkan laporan situasi jumlah rakyat yang mengalami krisis atau ketidakamanan panga dapat dilihat dari gambar yang dibuat penulis dibawah ini:

Gambar 3.4

Kondisi Pangan Sudan Selatan

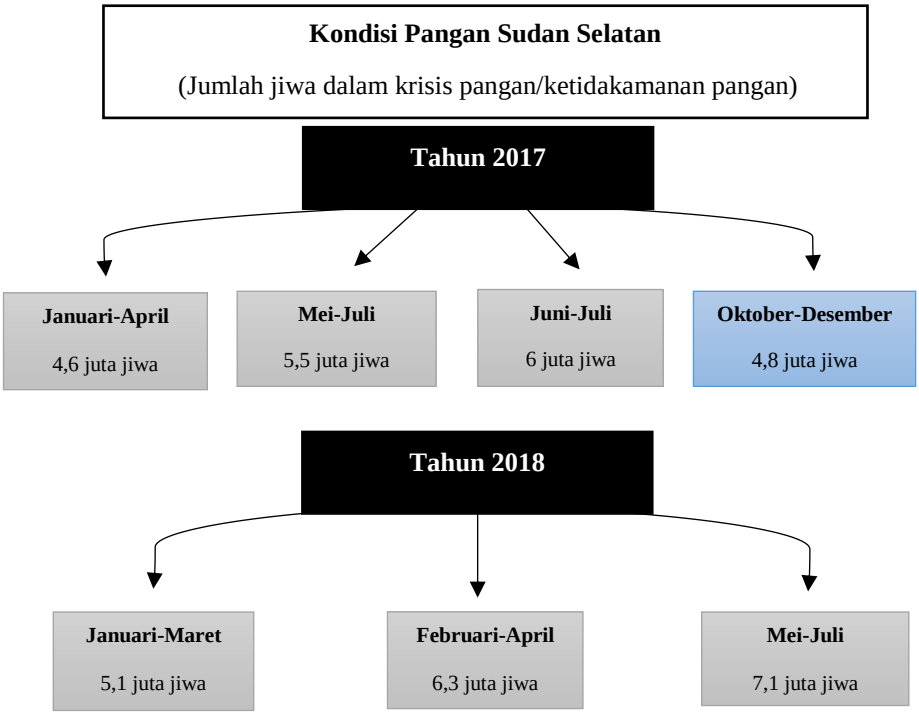

Ket:

Warna Abu-abu = Jumlah (Jiwa) Meningkat

Warna Biru = Jumlah (Jiwa) Menurun